



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARSO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **688349**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.595.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/118 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000
2. Tanah Seluas 425 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 1055 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 4901 m2 di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 4035 m2 di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
6. Tanah Seluas 708 m2 di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **133.190.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.300.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.890.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **34.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.244.497.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.006.687.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.006.687.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.